

SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

TAHUN 1949-1959

Paizon Hakiki, Pembimbing (1) Drs. Marwoto Saiman, M.pd, (2) Drs. Syofyan
Suri, M.pd
(paizonhakiki@yahoo.co.id)

ABSTRACT

Starting from the recognition of sovereignty, Indonesia entered a period of liberal democracy. Liberal democracy period applies between the years 1949-1959, characterized by the flourishing of political parties and enactment of parliamentary cabinet. Liberal democracy in Indonesia is characterized by political turmoil and political achievements. Political achievements such as the implementation of a multiparty system and democratic elections. Political turmoil in the form of successive cabinet and prolonged debate in kontituante. Used to describe a liberal democracy and a democratic political system. The Constitution can be used as a republic or a constitutional monarchy. Liberal democracy used by countries that follow the presidential system, parliamentary system or a semi-presidential system. Therefore, researchers interested in conducting research entitled: System of Government in Liberal Democracy year period from 1949 to 1959. This study aims to determine Indonesian system of democracy during the Liberal years 1949-1959. This research method is the method that is the history of a set of principles or rules that provide effective assistance in an effort to collect data or materials for history, critically assess, and then present a synthesis of the results in written form (Nugroho Noto Susanto, 1984:11). System of government in the political field during the Parliamentary democracy, or also known as Liberal democracy is a parliamentary cabinet system. This rule specifies that the system cabinet or ministers are responsible to parliament. Parliamentary cabinet system also introduced a system of voting (voting) is used in the general election (election), motion (do not believe), and the demonstration as a form of expressing the people's right to participate in politics.

Keyword: Liberal Democracy Year 1949-1959

PENDAHULUAN

Perkembangan bangsa Indonesia telah mengalami banyak perubahan baik secara konstitusi maupun sistem pemerintahan. Untuk pembahasan kali ini peneliti akan membahas mengenai sistem pemerintahan Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Seperti yang kita ketahui Demokrasi Liberal (atau Demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam Demokrasi Liberal, keputusan-

keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Berawal dari pengakuan kedaulatan, Indonesia memasuki masa demokrasi Liberal. Masa demokrasi Liberal berlaku antara tahun 1949-1959, ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Demokrasi Liberal di Indonesia ditandai oleh prestasi politik dan kemelut politik. Prestasi politik berupa pemberlakuan system multipartai dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kemelut politik berupa kabinet yang silih berganti dan perdebatan berkepanjangan dalam kontituante.

Prestasi politik dan kemelut politik merupakan hal yang terjadi pada masa demokrasi Liberal. Pada masa itu, untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilu I yang dinilai banyak kalangan merupakan pemilu yang paling demokratis. Begitu juga pada masa itu sering terjadi pergantian kabinet (Matroji, 2002:65).

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa demokrasi Liberal adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno yang melindungi hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Lebih lanjut Demokrasi liberal (atau Demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam Demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.[http://ananda-jagadhita.blogspot.Com /2011/05/Demokrasi liberal.htm](http://ananda-jagadhita.blogspot.Com/2011/05/Demokrasi%20liberal.htm).1

Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang Demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan Demokrasi langsung atau Demokrasi partisipasi. Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan Demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem Presidensial atau sistem semi Presidensial, [http://ananda-jagadhita.blogspot.com/2011/05/Demokrasi liberal.htm](http://ananda-jagadhita.blogspot.com/2011/05/Demokrasi%20liberal.htm).2

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Demokrasi Liberal memiliki dampak positif yaitu, dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa, yang melindungi hak-hak individu setiap warga Negara Indonesia, sehingga dengan demikian segala hak rakyatnya dapat terjaga dan terpenuhi.

Selain itu dalam demokrasi Liberal dapat menghidupkan suasana demokratis di Indonesia. Setiap warga berhak berpartisipasi dalam politik, antara lain mengkritik pemerintah, dan mendirikan partai politik. Kemudian mencegah

kekuasaan presiden yang terlalu besar karena wewenang pemerintah dipegang oleh partai yang berkuasa.

Lebih lanjut Matroji (2002: 66) menjelaskan bahwa demokrasi Liberal adalah demokrasi yang menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Ketika itu, kalangan militer belum terjun kekancah politik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pertanyaan yang muncul apakah Demokrasi itu? Apakah negara ini sudah Demokrasi?. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Sistem Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan salah satu cara kerja untuk memahami suatu objek penelitian yang sistematis dan intensif dari pelaksanaan penelitian ilmiah, guna memperoleh kebenaran yang optimal. Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah yaitu sebuah metode atau cara untuk mengungkap kembali kejadian-kejadian atau peristiwa masa lampau, sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Nugroho Notosusanto sebagai berikut:

Metode sejarah ialah sekumpulan prinsip atau aturan yang memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan data atau bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dan hasil-hasilnya dalam bentuk tertulis.(Nogroho Notosusanto, 1984:11). Sesuai dengan kutipan di atas, dapat diambil inti sarinya, yaitu dalam rangka melaksanakan metode sejarah dengan cara mengumpulkan bahan penelitian sejarah kemudian dinilai secara kritis, sehingga dapat menghasilkan sesuatu dalam bentuk tulisan.

Adapun cara atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu; peneliti menggunakan teknik kajian pustaka, yang merupakan bentuk pengumpulan data yang bersumber dari telaah buku-buku, literatur dan bahan bacaan lisan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu analisis data dengan tidak menggunakan data statistik akan tetapi penelitian menggunakan data dari kepustakaan dan internet, karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Cara yang ditempuh dalam analisis data ini adalah berupaya untuk menganalisa data yang terkumpul, diolah, diklasifikasikan dan dideskripsikan melalui kalimat-kalimat sesuai dengan sumbernya. (Suharsimi Arikunto, 2002:312). Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan metode historis dengan data kualitatif, deskriptif tentang Sistem Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959. Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode historis, maka data yang dianalisa melalui analisa historis.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Sistem Pemerintahan pada Tahun 1949-1959

Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa Demokrasi Parlementer, atau yang dikenal juga dengan sebutan Demokrasi Liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950). Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara (*voting*) yang digunakan dalam pemilihan umum (Pemilu), mosi, dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik (Matroji, 2002:67). Selain itu, adanya sistem multipartai pada masa ini menyebabkan terciptanya golongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, serta adanya sikap mementingkan kepentingan golongan partai politik masing-masing dari pada kepentingan bersama.

Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi Liberal adalah sistem kabinet presidensial. Sistem kabinet presidensial berlandaskan pada UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun 1945) dan kekuasaan tertinggi negara ditempati oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden. Sistem demokrasi ini menganut paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Paham tersebut berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip NASAKOM (nasionalisme, agama, dan komunisme). NASAKOM telah menyatukan kekuatan-kekuatan politik yang terus bersaing sejak masa Demokrasi Parlementer, sehingga mulai tercipta sikap saling gotong royong antar sesama anggota partai politik.

Pemerintahan pada masa Demokrasi Parlementer dijalankan oleh tujuh kabinet dengan masa jabatan berbeda. Ketujuh kabinet itu adalah Kabinet Natsir dengan masa jabatan antara 6 September 1950 – 18 April 1951, Kabinet Sukiman dengan masa jabatan antara 26 April 1951 – 26 April 1952, Kabinet Wilopo dengan masa jabatan antara 19 Maret 1952 – 2 Juni 1953, Kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan masa jabatan antara 31 Juli 1953 – 24 Juli 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap dengan masa jabatan antara 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo II dengan masa jabatan antara 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957, dan Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) dengan masa jabatan antara 9 April 1957 – 10 Juli 1959 (Matroji, 2002: 69-70). Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh ketujuh kabinet tersebut, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban rakyat, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilu, menyelesaikan masalah dan memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia, dan melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Selain itu, pada masa Demokrasi Parlementer ini juga dibentuk konstituante, sebuah lembaga yang bertugas untuk menyusun dan

menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) baru bagi Indonesia. <https://docs.google.com/document/d/1dW4Iya1EVViZUGR896GaiFmqlf2XtevAGTjV24IA0SA/edit?pli=1>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia pada tahun 1949-1959 adalah sistem demokrasi Liberal yaitu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

2. Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal di Indonesia (1949-1959)

Periode 1949 -1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI dan Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Masa pemerintahan kabinet tidak ada yang berumur panjang, sehingga masing-masing kabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan seluruh programnya. Keadaan ini menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Kabinet-kabinet yang pernah berkuasa setelah penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda adalah sebagai berikut:

Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951). Setelah bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan, kabinet pertama yang memerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi. PNI sebagai partai kedua terbesar lebih memilih kedudukan sebagai oposisi. PNI menolak ikut serta dalam kabinet, karena merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya.

Yahya (2005: 72) menjelaskan kabinet Natsir mendapat dukungan dari militer dan dari tokoh-tokoh terkenal yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Mr. Asaat, Mr. Moh. Roem, Ir. Djuanda dan Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:

1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
2. Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan.
3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat

Pada masa pemerintahan dan kekuasaan Kabinet Natsir terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Masalah dalam keamanan negeri, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Perundingan-perundingan masalah Irian

Barat juga mulai dirintis, namun mengalami jalan buntu. Oleh karena itu, muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Natsir. PNI juga tidak menyetujui berlakunya Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 tentang DPRD yang dianggap menguntungkan Masyumi. Mosi itu disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden. <https://docs.google.com/document/d/1dW4Iya1EVViZUGr896GaiFmq1f2XtevAGTjV24IA0SA/edit?pli=2>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa ini dipimpin oleh Mohammad Natsir sebagai perdana menteri yang didominasi oleh parta Masyumi, kemudian mulai goyah kegagalan dalam perundingan dengan belanda mengenai irian barat, selain itu kabinet ini jatuh setelah PNI mengajukan mosi tidak percaya menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah tentang DPSD dan DPRDS. Kemudian dilanjutkan oleh:

Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952). Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden, presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur. Hampir satu bulan Sartono berusaha membentuk kabinet koalisi antara PNI dengan Masyumi. Namun usahanya itu mengalami kegagalan, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret - 18 April 1951).

Presiden kemudian menunjuk Sukiman (Masyumi) dan Djojokusarto (PNI) sebagai formatur. Walaupun mengalami sedikit kesulitan, namun akhirnya mereka berhasil membentuk kabinet koalisi antara Masyumi dengan PNI dan sejumlah partai kecil. Kabinet koalisi itu dipimpin oleh Sukiman dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman memiliki program 7 pasal, dan di antaranya mirip dengan program dari kabinet Natsir, hanya beberapa hal mengalami perubahan dalam skala prioritas. Misalnya, mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Usia kabinet ini tidak jauh berbeda dengan kabinet Natsir, karena pada masa kabinet ini banyak menghadapi masalah-masalah seperti krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Kabinet Sukiman juga memprogramkan untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, walaupun belum juga membawa hasil.

Kedudukan Kabinet Sukiman semakin tidak stabil, karena hubungan dengan militer yang kurang baik, terutama terlihat dari sikap pemerintah menghadapi pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat, Jawa tengah, dan Sulawesi Selatan yang kurang tegas. Selanjutnya kedudukan Kabinet Sukiman semakin bertambah goyah sebagai akibat terjadinya pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Subardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran mengenai bantuan ekonomi dan militer berdasarkan ikatan *Mutual Security Act* (MSA) atau Undang-undang

Kerja Sama Keamanan. Kerja sama itu dinilai sangat merugikan politik luar negeri bebas-aktif yang dianut Indonesia, karena Indonesia harus lebih memerhatikan kepentingan Amerika Serikat. Bahkan lebih dari itu, Kabinet Sukiman dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat. Oleh karena itu, DPR menggugat kebijakan Kabinet Sukiman. Akhirnya Kabinet Sukiman pun menemui nasib yang sama, mengalami kejatuhan dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden. <https://docs.google.com/document/d/1dW4Iya1EVViZUGR896GaiFmq1f2XtevAGTjV24IA0SA/edit?pli=3>

Sedangkan menurut hemat penulis bahwa kabinet Sukiman merupakan koalisi PNI dan Masyumi. Kemudian kabinet ini mulai goyah akibat adanya kesepakatan antara Menlu Subandrio dan Duta Besar AS Merle Cochran tentang bantuan ekonomi dan militer. Kabinet ini dicecer tuduhan menyelewengkan Indonesia dari politik luar negeri bebas aktif, dan setelah PNI dan Masyumi menarik dukungannya kabinet inipun runtuh.

Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953). Setelah Kabinet Sukiman jatuh, digantikan oleh Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Wilopo sendiri adalah tokoh PNI. Program kerja kabinet ini ada 6 pasal, dan yang paling penting dari keenam program itu adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum. Kabinet ini juga mem-programkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan menciptakan keamanan dalam negeri. Program luar negerinya ditekankan kepada perjuangan pengembalian Irian Barat serta melaksanakan politik luar negeri yang bebas-aktif. Namun demikian, kabinet Wilopo ini juga tidak luput dari masalah-masalah yang menggoyahkan kedudukannya.

Masalah yang cukup berat dihadapi oleh Kabinet Wilopo adalah masalah Angkatan Darat yang dikenal dengan *Peristiwa 17 Oktober 1952*. Latar belakang peristiwa itu terkait dengan masalah ekonomi, reorganisasi atau profesi-onalisasi tentara dan campur tangan parlemen atas permasalahan militer.

Sementara itu, perkembangan ekonomi dunia kurang menguntungkan pemasaran hasil ekspor Indonesia. Penerimaan negara menjadi menurun. Dengan keadaan ekonomi yang sulit dan upaya pembentukan militer yang memenuhi standar profesional, maka anggota militer yang tidak memenuhi syarat (berpendidikan rendah) perlu dikembalikan kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan protes di kalangan militer. Kalangan yang terdesak dipimpin oleh Kolonel Bambang Sugeng menghadap presiden dan mengajukan petisi penggantian KSAD Kolonel A.H. Nasution. Tentu saja hal ini menimbulkan kericuhan di kalangan militer yang menjurus ke arah perpecahan.

Parlemen mengecam tindakan pemerintah, khususnya Menteri Pertahanan dan Pimpinan Angkatan Perang dan Darat. Beberapa anggota parlemen mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Mereka menilai bahwa parlemen terlalu ikut campur dalam tubuh tentara. Bahkan

pada tanggal 17 Oktober 1952 muncul demonstrasi rakyat terhadap presiden. Para demonstran itu menuntut kepada presiden agar membubarkan parlemen serta meminta presiden memimpin langsung pemerintahan sampai diselenggarakannya pemilu. Namun presiden menolak, dengan alasan bahwa ia tidak mau menjadi diktator, tetapi mungkin pula khawatir apabila tuntutan tentara dipenuhi ia akan ditunggangi oleh mereka.

Dalam perkembangan selanjutnya muncul golongan yang anti Peristiwa 17 Oktober 1952 dari kalangan Angkatan Darat sendiri. Menteri Pertahanan, Sekretaris Jenderal Ali Budihardjo dan sejumlah perwira yang merasa bertanggung jawab atas Peristiwa 17 Oktober 1952 di antaranya KSAP T.B. Simatupang dan KSAD A.H. Nasution mengundurkan diri dari jabatannya. Kedudukan Nasution digantikan oleh Bambang Sugeng. Walaupun Peristiwa 17 Oktober 1952 tidak menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo, tetapi berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Masalah lain yang menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo adalah masalah tanah di Tanjung Morawa, satu kecamatan di Sumatera Timur. Di kecamatan itu terdapat perkebunan asing, antara lain perkebunan kelapa sawit, teh, dan tembakau. Atas dasar persetujuan KMB, para pengusaha asing itu menuntut pengembalian lahan perkebunan mereka, padahal perkebunan itu telah digarap oleh rakyat sejak zaman pendudukan Jepang. Ternyata pemerintah menyetujui tuntutan dari para pengusaha asing itu dengan alasan akan menghasilkan devisa dan akan menarik modal asing lainnya masuk ke Indonesia. Di sisi lain, rakyat tidak mau meninggalkan tanah-tanah yang telah digarapnya itu. Maka pada tanggal 16 Maret 1953 terjadilah pentraktor tanah tersebut. Hal ini menimbulkan protes dari rakyat. Namun protes rakyat itu disambut tembakan oleh polisi, sehingga jatuh korban di kalangan rakyat.

Peristiwa itu dijadikan sarana oleh kelompok yang anti kabinet dan pihak oposisi lainnya untuk mencela pemerintah. Kemudian mosi tidak percaya muncul di parlemen. Akibatnya Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden pada tanggal 2 Juni 1953 tanpa menunggu mosi itu diterima oleh parlemen (Matroji, 2002: 69).

Kabinet ini merupakan zeken kabinet, karena terdiri atas para pakar dan ahli dibidangnya. Kabinet ini mengalami tantangan berat, berupa gerakan separatis disejumlah daerah dan beberapa pemberontakan lain sehingga mengakibatkan kabinet ini runtuh.

Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955). Dua bulan setelah mundurnya Kabinet Wilopo terbentuk kabinet baru yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo. Kabinet Ali mendapat dukungan dari PNI dan NU, sedangkan Masyumi memilih sebagai oposisi. Kabinet Ali mempunyai program 4 pasal:

- a. Program dalam negeri antara lain meningkatkan keamanan dan kemakmuran dan segera diselenggarakan pemilihan umum.

- b. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
- c. Program luar negeri antara lain pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali Persetujuan KMB.
- d. Penyelesaian pertikaian politik.

Meskipun keamanan dan kemakmuran menjadi program utama, realisasinya memang sangat sulit. Kabinet Ali juga mendapatkan kesulitan dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pimpinan Daud Beureueh yang menuntut Aceh sebagai provinsi dan meminta perhatian penuh atas pembangunan daerah. Daud Beureueh menilai bahwa tuntutan itu diabaikan, sehingga ia menyatakan Aceh menjadi bagian dari Nil (Negara Islam Indonesia) buatan Kartosuwiryo (September 1953). Usaha meningkatkan kemakmuran mengalami kegagalan karena inflasi dan korupsi yang meningkat.

Kegagalan yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Ali adalah masalah Angkatan Darat. Setelah Peristiwa 17 Oktober, Nasution mengundurkan diri sebagai KSAD. Ia digantikan oleh Bambang Sugeng. Sementara itu, perwira-perwira AD yang anti dan pro Peristiwa 17 Oktober berhasil memulihkan persatuan dan menandatangani Piagam Yogyakarta (25 Februari 1955). Oleh karena tugasnya dirasakan sangat berat, Bambang Sugeng mohon berhenti dan dikabulkan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah mengangkat Bambang Utoyo sebagai KSAD baru. Akan tetapi Angkatan Darat yang berada di bawah pejabat KSAD yang dikepalai oleh Zulkifli Lubis menolak. Ketika Bambang Utoyo dilantik pada tanggal 27 Juni 1955, TNI-AD memboikot pengangkatan itu. Bambang Utoyo adalah KSAD yang tidak pernah berkantor di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD).

Akibat peristiwa tersebut dan berbagai kemelut yang lain, kabinet ini dinilai gagal. Banyak partai yang menarik menterinya dari kabinet. Akhirnya pada tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada wakil presiden (karena saat itu presiden sedang menunaikan ibadah haji). Namun di balik kegagalan Kabinet Ali, kabinet tersebut masih memiliki kesuksesan, di antaranya adalah menyiapkan pemilihan umum dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. [https://docs.google.com/kabinet ali Sastroamidjojo/2003/diakses pada tanggal 2 Juli 2013](https://docs.google.com/kabinet%20ali%20Sastroamidjojo/2003/diakses%20pada%20tanggal%202%20Juli%202013)

Menurut pandangan penulis bahwa kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU. Kemudian kabinet ini mendapatkan ujian berat yaitu kemelut dalam tubuh angkatan darat, akan tetapi kabinet ini runtuh akibat memuncaknya krisis ekonomi dan perseteruan antara PNI dan NU yang menarik dukungannya.

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956). Kabinet Ali digantikan dengan Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk oposisi. Hasil yang menonjol dari kabinet ini adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk kali pertama bagi bangsa Indonesia, yang

berlangsung pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.

Peristiwa tanggal 27 Juni 1955 yang menjadi penyebab kegagalan dari Kabinet Ali berhasil diselesaikan dengan mengembalikan posisi Nasution sebagai KSAD. Prestasi lainnya yang dicapai oleh kabinet ini adalah pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Setelah hasil pemilihan umum diketahui mengubah susunan dan keseimbangan perwakilan di DPR, maka pada tanggal 3 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet peralihan dari DPR Sementara ke DPR hasil pemilihan umum.

Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 - 14 Maret 1957). Ali Sastroamidjojo kembali disertai mandat untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet baru yang dibentuknya itu merupakan kabinet koalisi antara PNI, Masyumi dan NU. Program pokok kabinet ini adalah sebagai berikut:

1. Pembatalan KMB.
2. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.
3. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan dan pertanian.
4. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia-Afrika.

Kabinet Ali Sastroamidjojo membatalkan seluruh Perjanjian KMB pada tanggal 3 Mei 1956. Upaya kabinet ini untuk memperbaiki masalah ekonomi mengalami kesulitan, disusul oleh munculnya gerakan separatisme di berbagai daerah yang dikenal dengan PRRI/Permesta. Gerakan itu menganggap bahwa pemerintah pusat mengabaikan pembangunan daerah-daerah. Mereka menuntut agar diadakan pergantian kabinet.

Dalam tubuh kabinet itu sendiri terjadi perpecahan antara PNI dengan Masyumi. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kepada presiden sesuai dengan tuntutan daerah. Sedangkan Ali Sastroamidjojo berpendapat bahwa kabinet tidak wajib mengembalikan mandatnya hanya karena tuntutan daerah. Pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik semua menteri dari kabinet. Peristiwa itu sangat melemahkan kedudukan kabinet Ali Sastroamidjojo, sehingga pada tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastroamidjojo akhirnya menyerahkan mandatnya kepada presiden. Oleh karena situasi negara yang kacau akibat terjadinya gerakan separatisme, dan konflik dalam konstituante, maka presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya (14 Maret 1957).

Pertentangan politik semakin meluas, sehingga pembentukan kabinet baru semakin bertambah sulit. Sementara itu, partai-partai masih tetap menempuh cara tawar-menawar kedudukan dalam membentuk kabinet baru. Akhirnya atas dasar keadaan darurat itu, presiden menunjuk

dirinya sendiri menjadi pembentuk kabinet. Presiden berhasil membentuk kabinet baru yang disebut dengan Kabinet Karya dan menunjuk Ir. Djuanda sebagai perdana menteri. ([https://docs.google.com/kabinet/Burhanuddin Haraha/2002/](https://docs.google.com/kabinet/Burhanuddin%20Haraha/2002/) diakses pada tanggal 2 Juli 2013).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menambahkan bahwa runtuhnya kabinet Burhanuddin Harahap tidak mendapatkan dukungan yang kuat pada saat pemilu I. Namun demikian, kabinet ini menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan yaitu pelaksanaan pemilu yang demokratis, kemudian menunjukkan keunggulan Indonesia dalam diplomasi perjuangan Irian Barat, dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Kabinet Karya (9 April 1957 - 10 Juli 1959) Kabinet Karya resmi dilantik pada tanggal 9 April 1957 dalam situasi negara yang sangat memprihatinkan. Kabinet Karya merupakan *zaken kabinet* (kabinet kerja) yaitu kabinet yang tidak berdasarkan atas dukungan dari parlemen karena kondisi negara dalam keadaan darurat, tetapi lebih berdasarkan keahlian.

Di bawah perdana menteri terdapat tiga orang wakil perdana menteri, yaitu Hardi, Idham Chalid dan Leimena. Tugas dari kabinet ini sangatlah berat terutama menghadapi pergolakan-pergolakan yang terjadi di berbagai daerah, perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia dan menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kabinet Karya menyusun 5 pasal yang disebut *Pancakarya*. Program-program dari kabinet ini di antaranya sebagai berikut.

- 1) Membentuk Dewan Nasional.
- 2) Normalisasi keadaan republik.
- 3) Melancarkan pelaksanaan pembatalan persetujuan KMB.
- 4) Memperjuangkan Irian Barat.
- 5) Mempercepat proses pembangunan

Dewan Nasional merupakan suatu badan baru yang bertujuan menampung dan menyalurkan aspirasi dari kekuatan-kekuatan nonpartai yang ada di masyarakat. Walaupun dewan ini telah terbentuk, namun kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara semakin meningkat. Terjadinya pergolakan di daerah-daerah yang menyebabkan terganggunya hubungan antara pusat dengan daerah masih terus berlangsung. Hal ini mengakibatkan sistem perekonomian nasional semakin bertambah parah.

Dalam upaya menghadapi pergolakan daerah, pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) pada tanggal 14 September 1957. Pada Munas itu dibahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang serta pembagian wilayah Republik Indonesia. Ketegangan yang terjadi antara pusat dan daerah serta antar kelompok masyarakat berhasil diatasi dengan baik. Sebagai upaya mewujudkan keputusan Munas, maka pada bulan Desember 1957 diselenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Dalam Munap ini disusun rencana pembangunan yang dapat memenuhi harapan

daerah. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan belum dapat direalisasikan, karena muncul berbagai peristiwa nasional yang segera harus ditangani oleh pemerintah. Peristiwa yang dimaksud itu adalah Peristiwa percobaan pembunuhan atas diri Presiden Soekarno pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa itu kemudian lebih dikenal dengan Peristiwa Cikini. Pelaku peristiwa itu diduga para pemuda pendukung Zulkifli Lubis.

Persatuan nasional yang semakin terancam, semakin diperburuk dengan munculnya Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia pada tanggal 10 Februari 1958, yang diketuai oleh Ahmad Husein dan mendapat dukungan dari Lubis, Simbolon, Dahlan Jambek, Natsir dan Sumitro Djojohadikusumo. Bersamaan dengan berdirinya gerakan itu, mereka mengirimkan ultimatum kepada pemerintah yang berisi tuntutan pem-bubaran Kabinet Karya dan pembentukan kabinet baru yang dipimpin oleh Moh. Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Selain itu presiden diminta bertindak secara konstitusional dan agar tuntutan itu dipenuhi dalam waktu 5 x 24 jam.

Kabinet Karya mencatat prestasi gemilang, yaitu keberhasilan mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia, dengan keluarnya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Dalam peraturan lama disebutkan bahwa laut teritorial itu selebar 6 mil dari garis dasar sewaktu air surut. Apabila hal itu diberlakukan, maka di wilayah Indonesia akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores dan lain sebagainya. Melalui Deklarasi Djuanda itulah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia, yaitu lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. (<https://docs.google.com/kabinet karya/2022/diakses> pada tanggal 2 Juli 2013).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kabinet karya dipimpin oleh Juanda, sebagai perdana menteri. Kabinet ini terdiri atas para pakar dibidangnya sehingga disebut *zaken kabinet*. Kemudian kabinet ini memiliki program bernama panca karya sehingga memperoleh sebutan kabinet karya, selain itu, kabinet ini juga menjadi demisioner saat presiden mencanangkan Dekrit pada 5 Juli 1959.

3. Perkembangan dibidang Ekonomi pada Tahun 1949-1959

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan *laissez faire laissez passer*. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

- a. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
- b. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
- c. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
- d. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
- e. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_liberal

4. Akhir dari Demokrasi Liberal

Berakhirnya demokrasi Liberal ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kegagalan Kontituante menetapkan UUD membawa Indonesia ketepi jurang kehancuran. Keadaan Negara yang telah merongrong sejumlah pemberontakan menjadi bertambah gawat. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan Negara dari bahaya, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkontitusional. Tindakan presiden tersebut berupa pengeluaran dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tindakan itu didukung oleh militer karena mereka sudah direpotkan oleh sejumlah pemberontakan akibat krisis politik.

Lebih lanjut dekrit presiden 5 Juli dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan diantaranya:

1. Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Kontituante
2. Kontituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang.

3. Kemelut dalam Konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merinangi pembangunan nasional (Matroji, 2002: 72)

Sedangkan yang menjadi keputusan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

- a. Konstituante dibubarkan
- b. UUD 1945 berlaku kembali sebagai UUD Republik Indonesia
- c. Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat (Matroji, 2002: 72).

KESIMPULAN

Berdasar hasil pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa Demokrasi Parlementer, atau yang dikenal juga dengan sebutan Demokrasi Liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950).
2. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara (*voting*) yang digunakan dalam pemilihan umum (Pemilu), mosi, dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Selain itu, adanya sistem multipartai pada masa ini menyebabkan terciptanya golongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, serta adanya sikap mementingkan kepentingan golongan partai politik masing-masing daripada kepentingan bersama.
3. Adapun kebijakan-kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain : a) Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US\$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun. b) Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %.

SARAN

Bertolak dari kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian di atas, demokrasi pada tahun 1949-1959 yang telah dilaksanakan, peneliti mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini hendaknya menjadi sumber tambahan bagi pembaca dalam menambah wawasan keilmuan terutama tentang demokrasi yang berkembang di Indonesia.
2. Dapat dijadikan kajian lebih lanjut bagi peneliti lain yang meneliti tentang demokrasi.

3. Dalam bekerja sama, khususnya bekerja sama dalam membangun dan mengembangkan pemerintahan, kita sebaiknya lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan golongan atau anggota maupun kepentingan pribadi. Selain itu, kita juga perlu menumbuhkan dan mengembangkan sikap saling bahu membahu serta gotong royong dalam menjalankan pemerintahan. Dengan menanamkan sikap-sikap positif tersebut dalam kehidupan bernegara, dapat mendukung tercapainya tujuan dan kesejahteraan suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Wisnu Aji. 2010. *Kudeta Supersemar*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta
- Asshiddie, Jimly. 2006. *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Kahkamahh Konstitusi*. Kunstitusi Press. Jakarta
- Azra, Azyumardi. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Dedi Supriyadi. 2007. *Sejarah Hukum Islam*. Pustaka Setia. Bandung
<https://docs.google.com/document/d/1dW4Iya1EVViZUGR896GaiFmqlf2XtevAGTjV24IA0SA/edit?pli=1>
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_liberal
- Inu Kencana. 2002. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Matroji. 2002. *Sejarah*. Jakarta: Erlangga
- Mohammad Hatta. 2008. *Demokrasi Kita*. Bandung: Segarsy
- Muhammad, Yahya. 2005. *Perkembangan Militer dalam Perkembangan Politik di Indonesia 1945-1966*. Gajah Mada Universiti Press. Yogyakarta
- Ni'matul Huda. 2012. *Ilmu Negara* Jakarta: Rajawali Pers
- Ramayulis. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia
- Samodra Wibawa. 2001. *Negara-negara di Nusantara*. Yogyakarta: UGM
- Soebijono. 1997. *Dwifungsi ABRI*. Yogyakarta: UGM
- Sumarsono. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Etika Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Yahya A. Muhaimin. 2005. *Perkembangan Militer dalam Molitik di Indonesia 1945-1988*. Yogyakarta. UGM
- Wibawa, Samodra. 2001. *Negara-negara Di Nusantara*. Gajah Mada Universiti Press. Yogyakarta